Pengaruh Evolusi Keamanan Jerman Terhadap Arsitektur Keamanan Eropa Pasca Perang Dingin

Adi Rio Arianto
Dosen di UPN Jakarta
arianto.adirio@gmail.com

ABSTRACT

This study explained that Germany has a strong influence in the shaping of the regional security architecture of Europe post-Cold War by using its 'foreign policy strategic' in influencing the behavior of states and regional institutions both structural and relational to preserve and to maintain the regional security of Europe. Germany showed its ability in five stages, namely: (1)balancing the rivalry of “the Big Three of Europe” and the configuration of power in Europe, (2)performing the function of “regional power” in Europe, (3)strengthening Europe as “Vibrant Continent”, (4)strengthening EU as “Constructive of European Security”, and (5)strengthening NATO as “Complement of European security”.

Keywords: power, geopolitik, security, Germany, Europe

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bahwa Negara Jerman memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan keamanan regional di Eropa pasca Perang Dingin dengan menggunakan ‘strategi kebijakan luar negeri’ dalam mempengaruhi perilaku negara lain dan institusi regional baik secara structural maupun relasional untuk mendapatkan dan mempertahankan keamanan regional di Eropa, yaitu : (1) menyeimbangkan perselisihan diantara “Tiga Negara Besar di Eropa” dan konfigurasi kekuatan di Eropa, (2) menunjukkan fungsi sebagai “kekuatan regional di Eropa”, (3) memperkuat Eropa sebagai “Kontinen Besar”, (4) memperkuat UE sebagai “Pembentuk Keamanan Eropa”, dan (5) memperkuat NATO sebagai “pelengkap dalam keamanan Eropa”

Kata kunci: kekuatan, geopolitik, keamanan, Jerman, Eropa

I. PENDAHULUAN

Reunifikasi Jerman memiliki pengaruh bagi situasi keamanan regional Eropa. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan strategi Jerman dalam pembentukan arsitektur keamanan regional Eropa. Strategi ini diperkuat dengan status Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Selain itu, secara geopolitik, Jerman adalah jantung Eropa “*Deutschland liegt im Herzen Europas*” (Janning, 2008: 79). Jerman merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk terbesar kedua di kawasannya.

Perang Dingin secara geopolitik memecah Jerman menjadi dua wilayah pengaruh, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, dan Jerman bersatu kembali pada tahun 1990. Pasca Perang Dingin Jerman mulai berbenah. Jerman telah mengeluarkan anggaran belanja yang sangat besar untuk menopang Eropa Barat—*West European Union* disingkat *WEU*—yang memiliki tingkat produktivitas tinggi terutama bidang ekonomi dan memiliki tingkat standar negara yang tinggi pula (Janning, 2008: 79). Pada tahun 1999, Jerman dan 10 negara Eropa memperkenalkan mata uang bersama bagi negara-negara Eropa, yaitu “*Euro*” (Janning, 2008: 84). Jerman nampaknya menjadi barometer negara maju di Eropa yang memiliki peranan penting dalam percaturan politik global. Dengan demikian, perlu ditelaah lebih dalam bagaimana Jerman menciptakan pengaruhnya di Eropa setelah sebelumnya mengalami kelemahan. Dalam hal ini, kemampuan Jerman untuk meyakinkan dan mengajak otoritas negara-negara dan institusi-institusi di kawasan Eropa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan strategi Jerman di level kawasan. Dengan demikian, secara spesifik studi ini berpijak pada pertanyaan penelitian utama, yaitu: bagaimana pengaruh revolusi keamanan Jerman terhadap arsitektur keamanan regional Eropa pada periode Pasca Perang Dingin?

II. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam tulisan ini yaitu: (1) konsep “*regional powers and security orders*”, digunakan untuk menelaah aktor berpengaruh dalam pembentukan arsitektur keamanan Eropa. Konsep ini menekankan pada bagaimana cara identifikasi, manajemen dan pencegahan ancaman keamanan regional yang sangat dipengaruhi oleh peran *regional powers*; (2) konsep “*foreign policy strategies*” digunakan untuk menelaah cara melaksanakan power di level regional melalui penggunaan institusi kawasan atau melalui negara anggota

kawasan; dan (3) konsep “*regional security complex*” digunakan untuk melihat hasil pelaksanaan power di kawasan melalui pengamatan “*regional security complex*”. Kompleksitas keamanan regional dalam suatu kawasan dibangun melalui pola persaingan (*enmity*), dan atau pola kerjasama (*amity*).

Menurut analisis yang dikemukakan oleh *European Consortium for Political Research* (ECPR), yang dimaksud dengan *regional powers* adalah "sebuah negara yang berada di suatu kawasan geografis, dimanapun negara tersebut mendominasi kawasan dalam hal ekonomi dan militer, mampu memberi pengaruh hegemoni di kawasan dan pengaruh (memungkinkan) di skala global, dan secara sukarela “*willingness*” bersedia memanfaatkan sumber daya kekuatan dan diakui atau diterima sebagai pemimpin regional oleh tetangganya" (Jurnal *European Consortium for Political Research*). Adapun, yang dimaksud dengan “*security order*” adalah pemetaan, pengaturan, dan proporsi tatanan keamanan di tingkat kawasan yang menekankan pada cara identifikasi, manajemen dan pencegahan berbagai jenis ancaman keamanan regional (Stewart-Ingersoll, 2012: 33-35).

Kebijakan luar negeri strategis adalah kebijakan yang diciptakan melalui persepsi *regional powers* terhadap proyeksi negara-negara dan institusi-institusi kawasan (Baldwin, 2002: 187). Dengan demikian, untuk melaksanakan pengaruh di level regional, negara dituntut untuk mampu melihat ruang, lalu menentukan strategi yang tepat untuk dilaksanakan di level operasional. Baldwin menegaskan, negara mesti menentukan strategi kebijakan luar negeri untuk diproyeksikan ke luar, baik di level regional maupun global. Ia mempertegas dengan analisis “*the crucial question is which foreign policy strategies can regional powers pursue to react regional [hegemonic] position?*” (Baldwin, 2002: 187). Menurut Baldwin, *power* dapat diciptakan dan dilaksanakan melalui pembentukan, penggunaan, dan pemeliharaan institusi, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan (Baldwin, 2002: 187). Oleh karena itu, suatu negara perlu menilai bagaimana memanfaatkan institusi kawasan untuk menegaskan kepentingannya lalu menciptakan pengaruhnya di kawasan.

Menurut Buzan dan Waefer, analisa *regional security complex* (RSC) meliputi berbagai macam unsur seperti geografi, etnisitas serta budaya masyarakat sekitar wilayah tersebut (Buzan-Waefer, 2003: 44). Faktor-faktor ini selanjutnya akan mempengaruhi dan menciptakan saling ketergantungan antarnegara dalam suatu kawasan yang kemudian akan menimbulkan satu kompleksitas keamanan regional. Dalam suatu ini permasalahan mengenai keamanan negara-negara berhubungan erat, sehingga permasalahan mengenai keamanan nasional tidak akan ada tanpa memperhitungkan keamanan regional.

Ketergantungan antarnegara di suatu kawasan selalu dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti perimbangan kekuatan, aliansi, serta masuknya kekuatan luar di dalam kawasan (Buzan-Waefer, 2003: 47). Buzan dan Waefer merumuskan empat variable penyusun kompleksitas keamanan regional, yaitu (1) batas wilayah (pembeda antara *regional security complex* dan negara di sekitarnya), (2) Struktur anarkis (*RSC* harus terdiri dari minimal dua unit otonom), (3) polaritas (pola penyebaran kekuasaan antarunit), (4) konstruksi sosial (pola *amity* dan *enmity*). Teori *RSC* ini pada akhirnya bertujuan untuk membentuk suatu pengaturan keamanan sebagai satu tujuan akhir dari regionalisasi yang mempunyai basis keamanan kawasan.

III. ARSITEKTUR KEAMANAN REGIONAL EROPA: DARI PERANG DINGIN KE PASCA PERANG DINGIN

Sebagai pengantar dalam memahami pengaruh Jerman di Eropa, maka analisis tentang situasi arsitektur keamanan Eropa dari Perang Dingin menuju Pasca Perang Dingin menjadi penting untuk dianalisis. Adapun, yang dimaksud dengan “Arsitektur Keamanan Eropa” adalah serangkaian proses politik penting yang membentuk lingkungan strategis, termasuk di antaranya adalah proses integrasi Eropa, evolusi dari Rusia, pengembangan hubungan Transatlantik, dan evolusi manajemen krisis di wilayah Eropa—juga termasuk Atlantik (Ruhle, 2001). Arsitektur keamanan regional Eropa pada periode Perang Dingin dapat dipahami melalui empat hal berikut, yaitu pertama, Bipolaritas Blok Timur vs. Blok Barat yang menandai sistem keamanan Eropa hanya dapat dipahami dalam konteks konflik ideologi Timur-Barat antara NATO vs. Pakta Warsawa (Tucker, 1992: 47). Kedua, menguatnya NATO di Eropa dalam mengimbangi Pakta Warsawa. Sebagai akibatnya, muncullah peristiwa Deunifikasi Jerman di Eropa. Ketiga, Deunifikasi Jerman Timur dan Jerman Barat geopolitik memperlemah posisi Jerman di Eropa (Winkler, 2008: 36). Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya pengaruh Jerman di Eropa. Keempat, munculnya UE yang digagas oleh negara-negara Eropa sendiri (Janning, 2008:82).

Sedangkan, arsitektur keamanan regional Eropa periode Pasca Perang Dingin dapat dipahami melalui: pertama, pascajatuhnya Uni Soviet, NATO tidak lagi memiliki rivalitas. Jatuhnya Uni Soviet membuat dunia tidak menitik-beratkan lagi pada militer. Kedua, transformasi NATO Pasca Perang Dingin di Eropa. Pasca Perang Dingin, NATO mengalami perubahan paradigma dalam melihat proyeksi keamanan global, khususnya keamanan internasional yang mencakup wilayah Eropa dan Atlantik Utara. Ketiga,

Reunifikasi Jerman di Eropa menjadi salah satu indikator dalam menganalisis peristiwa Pasca Perang Dingin yang terjadi di Eropa. Berakhirnya “sistem bipolar” pada periode Pasca Perang Dingin membawa dampak terhadap Uni Soviet dan hal ini juga turut mempengaruhi arsitektur keamanan regional Eropa (Gaddis, 2005: 41). Hal ini ditandai dengan peristiwa bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, dibubarkannya Pakta Warsawa dan pengumuman Presiden Yeltsin tentang keinginan Rusia bergabung dengan NATO. Keempat, transformasi UE Pasca Perang Dingin: UE Menguat di Eropa. Kepedulian Eropa dalam memperkuat kerjasama multilateral mengenai keamanan regional dan internasional di Eropa diwujudkan dalam bentuk penciptaan ‘Strategi Keamanan Eropa’ pada tanggal 12 Desember 2003. Masalah keamanan ini menjadi penting setelah terjadi serangan pada tanggal 11 Maret 2004 di Madrid dan 7 Juli 2005 di London. Berdasarkan *European Security Strategy*, pada periode Pasca Perang Dingin, UE mengalami transformasi dan memiliki tiga kunci kebijakan luar negeri dalam rangka menghadapi tantangan keamanan, yaitu (1) memperpanjang zona pertahanan dan keamanan di luar batas Eropa, (2) mendukung kemunculan tatanan internasional yang adil dan stabil, khususnya sistem multilateral yang efektif, dan (3) mencari tindakan balasan yang efektif terhadap ancaman lama dan ancaman baru. Evolusi keamanan Eropa dari Perang Dingin ke Pasca Perang Dingin nampaknya turut mempengaruhi model penciptaan stabilitas kawasan Eropa menjadi jauh lebih kompleks.

IV. EVOLUSI KEBIJAKAN KEAMANAN JERMAN: DARI PERANG DINGIN KE PASCA PERANG DINGIN

Evolusi keamanan Eropa dari Perang Dingin ke Pasca Perang Dingin turut mempengaruhi terjadinya evolusi kebijakan keamanan Jerman di Eropa. Kebijakan keamanan Jerman pada periode Perang Dingin, yaitu: pertama, kebijakan normalisasi Republik Federal Jerman (RFJ) vs. Republik Demokratik Jerman (RDJ) (GHDI, 2009). Kedua, sejak jabatan kanselir dipegang oleh Willy Brandt (1969-1974), kebijakan politik luar negeri “*Ostpolitik*” Jerman fokus pada peredaan ketegangan dengan Polandia dan dengan negara-negara lain di kawasan Eropa Timur dan bagian timur Eropa Tengah (GHDI, 2009; Fink, 2009). Ketiga, Kebijakan pra-Reunifikasi Jerman menjadi langkah penting dalam sejarah Jerman di Eropa.

Sedangkan, kebijakan Jerman Pasca Perang Dingin meliputi: Pertama, kebijakan Kerjasama Multilateral di Eropa: “*Germany Never Again and Germany Never Alone*”.

Evolusi penting terkait kebijakan keamanan adalah bahwa “*the expand concept of security convers not only questions about conflict prevention, defense, disarmament and arms controls, but also economic, ecological, and social issue as well as human right* (Schollgen: 2008: 73).” Selain itu, berikut dua hal fundamental dan paling mendasar terkait evolusi kebijakan keamanan Jerman di Eropa, yaitu: (1) bahwa Jerman “tidak lagi (*never again*)” dan “tidak sendiran lagi (*never alone*)” dalam mengatasi masalah keamanan Eropa di masa kini dan ke depannya (Schollgen, 2008: 74). Dalam konteks ini, Jerman nampaknya tidak ingin lagi mengulang sejarah peperangan seperti yang terjadi di masa lalu. Dengan menekankan pada filosofi keamanan bersama di kawasan Eropa pasca Perang Dingin (Schollgen, 2008: 74).

Kedua, Kebijakan Intergrasi dan Perluasan Keanggotaan UE di Eropa. Keanggotaan UE terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan kedua, negara tersebut menerapkan prinsip demokrasi, hukum, penghormatan HAM dan menjalankan peraturan perundangan UE (*acquis communautaires*) (Munkler: 2008, 15). Keanggotaan Jerman di EU bermula sejak UE didirikan bersama Prancis dan negara Eropa lainnya. Adapun, kelembagaan UE dimulai sejak proses penandatanganan perjanjian UE, 1992.

Ketiga, Kebijakan Kerjasama Multilateral di NATO. Jerman ketika masih berstatus sebagai *Republik Federal Jerman/ RFJ* mulai bergabung menjadi anggota NATO tahun 1955 (Winkler, 2008: 38). Hingga hari ini Jerman tetap menjaga hubungan dengan NATO di Eropa. Kebijakan Jerman di NATO mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan kelembagaan UE di Eropa. Meskipun kerjasama multilateral di NATO menjadi prioritas kedua setelah UE, Jerman tetap menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota aliansi dalam berbagai bidang. Sejauh ini, fokus kerjasama Jerman adalah memperkuat integrasi UE menjadi lebih kuat dan stabil.

V. PENGARUH EVOLUSI KEAMANAN JERMAN TERHADAP ARSITEKTUR KEAMANAN EROPA PASCA PERANG DINGIN

Pada akhirnya, Jerman memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan arsitektur keamanan regional Eropa pada periode Pasca Perang Dingin. Pengaruh tersebut dapat

dijelaskan lima hal berikut, yaitu pertama, memahami posisi regional powers dan perimbangan kekuasaan di Eropa: berupa rivalitas “*The Big Three of Europe*” dan konfigurasi power di Eropa; kedua melihat posisi Jerman sebagai “*Regional Power*” di Eropa; ketiga, pengaruh Jerman terhadap penguatan Eropa sebagai “*Vibrant Continent*”; keempat, pengaruh Jerman terhadap penguatan UE sebagai “*Constructive of European Security*”; dan yang kelima, pengaruh Jerman terhadap penguatan NATO sebagai “*Complement of European Security*”. Berikut adalah uraiannya.

A. Regional Powers dan Perimbangan Kekuasaan di Eropa: Rivalitas “The Big Three of Europe” dan Konfigurasi Power di Eropa Pasca Perang Dingin

Perimbangan kekuasaan di Eropa tidak luput dari interaksi baik kerjasama maupun kompetisi dari tiga negara besar di Eropa yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai “*The Big Three of Europe*.” Ketiga negara ini memiliki kekuatan berpengaruh di Kawasan Eropa. Terlebih lagi setelah dibentuknya kerjasama *German-Franco Security Cooperation* dan *German-British Security Cooperation*. Di sini Jerman menjadi kendali penting bagi kerjasama segitiga di atas. Dari segi anggaran belanja, Jerman adalah penyumbang terbesar bagi anggaran militer UE, meskipun negaranya memiliki anggaran nasional sekitar 32,490 Euro dengan personel militer aktif sebesar 191,721 orang. Jerman berada di posisi ketiga setelah Inggris dan Prancis. Adapun, secara relational, analisis berikut menunjukkan kekuatan relasi yang dibangun oleh masing-masing dari “*The Big Three of Europe*” yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman.

Pertama, Inggris menjadi negara yang tidak tergabung dalam *Eurozone*, dimana mata uang *Pound Sterling* tetap ia gunakan hingga kini. Sebagai eks-hegemon, kekuatan Inggris masih diperhitungkan dalam konstelasi internasional. Hal ini bisa dilihat dari tekad Inggris untuk tetap menggunakan mata uang *Pound Sterling* meskipun negara UE lainnya telah memberlakukan *Euro* sebagai mata uang bersama. Inggris juga tidak terlibat dalam penandatanganan Perjanjian *AXA Schengen* tahun 1985, meskipun pada tahun 2000 akhirnya bergabung dengan *AXA Schengen* dalam aspek kriminalitas, pemberantasan obat-obatan terlarang, serta bergabung dalam *Schengen Information System*. Bergabungnya Inggris adalah untuk memelihara stabilitas keamanan domestik dari ancaman kejahatan transnasional di kawasan Eropa (*European Commission*, Europa.eu, 2015). Selain itu, Inggris kurang kuat dalam hal legitimasi sebagai perwakilan atau representasi dari kepentingan negara-negara Eropa melalui jalur institusi UE di Eropa. Meskipun, Inggris memiliki hak

veto di PBB namun hal itu tidak mampu mencerminkan dirinya sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan bagi negara Eropa di kawasannya. Hal ini disebabkan oleh Inggris bukan negara *Eurozone* di Eropa. Ia juga masih mempertahankan mata uang *Pound Sterling* nya di Eropa sehingga tidak memiliki legitimasi kuat di Eropa yang pada akhirnya berimbas pada pengaruh Inggris terhadap negara-negara Eropa dan memperlemah kerjasamanya di UE.

Kedua, Robert Schuman, menteri luar negeri Prancis, merupakan salah satu pencetus pembentukan ECSC—cikal bakal UE—dengan mendapat saran dari Jean Monnet. Sumbangan Jean Monnet yang selanjutnya direfleksikan dalam UE adalah konsep penyatuan kedaulatan semua negara anggota yang bisa dilihat dari diberlakukannya Euro sebagai mata uang bersama (Hay, 2003). Pembentukan ECSC yang diprakarsai Prancis ini dipandang cukup urgen karena batubara dan baja merupakan bahan mentah yang sangat penting dalam perang. Komunitas ini pun berpandangan bahwa kedua bahan mentah ini harus diubah perannya menjadi instrumen nonkoersif dan perdamaian (Fontaine, 2010). Selain itu, Prancis juga memiliki peranan dan pengaruh penting dalam menjaga agar Jerman tidak berada diluar control untuk mencegah konflik internal kawasan, sebaliknya, di sisi lain Jerman melihat bahwa ECSC menjadi jalan terbaik untuk kembali masuk sebagai negara berpengaruh di kawasan Eropa. Hal ini ditegaskan oleh Sugiono dalam analisisnya tentang “*The Crisis in Europe and the End of Regionalism*”, bahwa “*the European Coal and Steel Community (ECSC) was in fact established out of interest of the two big powers in Europe: France and Germany. While France had an interest to keep Germany under control, Germany saw the establishment of ECSC as way to re-enter community of states in Europe*” (Sugiono, 2012).

Selain itu, politik independen ini juga dilakukan oleh Prancis untuk menunjukkan pengaruhnya dalam integrasi Eropa, dikutip bahwa “*in the history of the European integration, the veto over the British membership application by Charles de Gaulle of France in 1963 constitutes a clear example of the significance of the nation-state as well as its potential to affect the process of integration*” (Sugiono, 2012).

Ketiga, pada tahun 1957, Jerman menjadi anggota UE untuk memulihkan citranya di kawasan Eropa, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, ia kerap terlibat perang. Keikutsertaan Jerman dalam UE juga memiliki tujuan untuk memulihkan hubungan Jerman dengan negara-negara yang dahulunya terlibat Perang Dunia melalui visi pengintegrasian UE, termasuk terbentuknya *Eurozone* dengan penciptaan mata uang tunggal “Euro” yang mulai berlaku di tahun 2002. UE juga menjadi batu pijakan

Jerman yang diarahkan pada pengintegrasian dan pengembangan sayap UE (Belkin, 2009). Jerman memainkan posisi signifikan dengan memainkan politik mata uang *Euro* untuk mengendalikan perilaku dan kebijakan negara-negara anggota *Eurozone*. Saat ini, Jerman menjadikannya kekuatan paling berpengaruh di Eropa, terbukti dari banyaknya kursi yang dimilikinya di Parlemen Eropa terbanyak yaitu 96 kursi dari 785 kursi, kemudian disusul Prancis 74 kursi, Inggris 73 kursi dan Italia 73 kursi (Fontaine, 2010; europarl.europa.eu, 2009).

B. Posisi Jerman sebagai “Regional Power” di Eropa

Bagian ini mengulas posisi Jerman di Eropa dari konteks “*Regional Powers*” menuju “*Security Orders*” di Eropa, dimana konstruksi posisi ini sekaligus menjelaskan pengaruh dalam membentuk keamanan kawasan di Eropa. *Regional power* yang dimaksud disini adalah bahwa Jerman mampu memainkan empat dimensi berpengaruh berikut.

Pertama, Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia tahun 2008 (*CIA Factbook*, 2005). Jerman juga adalah eksportir terbesar ketiga dunia pada tahun 2011 dengan nilai 1,409 triliun dolar AS (*The World Factbook of CIA*, 2012). Saat ini, perekonomian UE sebagian besar diciptakan melalui perekonomian Jerman (Engdahl, 2010). Kendali politis UE terletak di Jerman dengan melakukan: (1) mendifusi mata uang Jerman “*Deutsche Mark*” menjadi mata uang regional UE “Euro” sekaligus menjadi alat kontrol Jerman terhadap negara-negara anggota UE (politik Euro); (2) menjadi pembayar iuran terbesar di UE; (3) menjadi negara paling kuat dalam bidang ekonomi sebagai pondasi menuju negara hegemon Eropa (Gilpin, 1981: 200).

Kedua, Jerman sebagai “kekuatan militer” paling efektif di Eropa. Jerman merupakan negara Eropa yang mampu mengontrol penggunaan fungsi militer secara efektif. Kengenggan Jerman dalam menggunakan militer untuk mengintervensi daerah-daerah yang rawan konflik menjadi dasar kuat bagi UE untuk lebih mengutamakan kerjasama dan diplomasi dalam penyelesaian konflik. Jerman tetap menjadi negara Eropa yang menempati posisi pertama pembayar iuran terbesar bagi anggaran militer PBB. Dan urutan ketiga di dunia setelah AS dan Jepang (Schollgen, 2008:76). Dengan setoran sebesar 26,6 miliar Euro, Jerman menanggung kurang lebih 20 persen dari anggaran belanja militer UE, sehingga menjadi pembayar iuran terbesar di UE (*TUD*, 2013).

Ketiga, Jerman sebagai “sentral geopolitik” di Eropa. Perang Dunia I dan Perang Dunia II adalah Jerman agresif, wajah Jerman pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II

adalah wajah geopolitik internasional di masa itu. Perang Dingin dan pasca Perang Dingin adalah Jerman dingin, sekaligus mewakili wajah geopolitik internasional di masa itu.

Keempat, Jerman adalah arsitek keamanan Eropa, secara geopolitik posisinya selain berada di *mainland* Eropa, Jerman juga berada di *centralland* Eropa. Jerman memberikan pengaruh secara ‘pasif’ sebagai arsitek Keamanan Eropa semasa periode Perang Dingin, sedangkan pada periode Pasca Perang Dingin, Jerman mulai memberikan pengaruh secara ‘aktif’ bagi pembentukan arsitektur keamanan Eropa. Kemampuan Jerman dalam mengelola strategi geopolitik dan kebijakan keamanannya turut berpengaruh dalam pembentukan arsitektur keamanan regional Eropa. Menurut Adi Rio Arianto, kebijakan geopolitik dan keamanan Jerman dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan luar negeri Jerman di level regional, oleh karena itu, Jerman memiliki kepentingan untuk “men-Jerman-kan Eropa” yang dalam situasi ini disebut sebagai Teori Eropa III dan “meng-Eropa-kan Jerman” yang dalam situasi ini disebut sebagai Teori Eropa IV (Arianto, 2015: 86). Teori Eropa III maksudnya adalah ada usaha yang ingin dibangun oleh Jerman di Eropa secara perlahan namun pasti, yaitu berusaha membangun sebuah langkah secara institusional, dimana langkah ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jerman dalam membangun Eropa. Ini merupakan sebuah keberhasilan yang telah dicapai oleh Jerman di masa sekarang. Sedangkan, yang dimaksud dengan Teori Eropa IV adalah bahwa Jerman menganggap ikut meleburkan diri dalam satu kesatuan nilai Eropa menjadi kunci penting untuk menggerakkan Eropa menuju ke arah yang lebih stabil. Oleh karena itu, pemahaman Teori Eropa III dan Teori Eropa IV datang untuk mempertegas bahwa di manapun dan dalam kondisi bagaimanapun, Jerman akan selalu menjadi motor penggerak yang sangat signifikan bagi perkembangan stabilitas kawasan Eropa di masa kini dan mendatang (Arianto, 2015: 86). Seperti yang ditegaskan oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel bahwa “Jerman adalah Eropa, dan Eropa adalah Jerman (Merkel, 2011). Pernyataan ini memperkuat bukti bahwa Jerman adalah benar-benar sebagai arsitek keamanan Eropa.

C. Pengaruh Jerman terhadap Penguatan Eropa sebagai “*Vibrant Continent*”

Salah satu alasan mengapa Jerman memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan arsitektur keamanan regional Eropa pada periode Pasca Perang Dingin adalah karena kemampuannya dalam menciptakan dan memperkuat Eropa sebagai “*Vibrant Continent*”. Adapun yang dimaksud dengan “*Vibrant Continent*” adalah sebuah kondisi dimana kawasan Eropa berada dalam situasi stabil dalam hal ekonomi, integrasi kawasan, dan untuk memastikan perdamaian, kemakmuran dan keamanan bersama di

kawasan Eropa yang disokong oleh kekuatan negara-negara anggota kawasan Eropa itu sendiri. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Kohler-Koch bahwa *“European integration as 'sui generis' in the sense that European integration does not substitute nation-states in Europe. Europe remains as a home for European states* (Sugiono, 2012).” Pendapat ini bermakna bahwa perdamaian, stabilitas, dan keamanan bersama dicapai dan diusahakan oleh negara-negara anggota kawasan Eropa. Adapun, dua negara paling aktif dalam menjaga stabilitas Eropa adalah Jerman dan Prancis. Kedua negara ini menganggap bahwa Eropa adalah jantung kerjasama Jerman dan Prancis yang mengarah pada karakter Eropa sebagai *“Vibrant Continent”* dunia (Le Monde, 2013). Sesuai dengan hasil wawancara dengan Duta Besar UE untuk Indonesia, Olof Skog, menyatakan bahwa *“the role of Germany and France is very important in strengthening the European Security and Defence Policy. This is because of both countries has strong relation in Europe, hereby they have more power in control the ESDP System in entirety of regional and Europe”* (Skog, 2014).

Dalam hal ekonomi, misalnya, stabilitas ini dapat ditunjukkan melalui penciptaan mata uang tunggal UE berupa *“Euro”* yang secara langsung mendorong penguatan integrasi yang mengarah pada stabilitas kawasan. Dalam hal ini, seperti yang ditekankan oleh Sugiono bahwa *“the most clear example which the neo-functionalists would probably put forward is the introduction of the single currency, the Euro. The demand for a single currency increased with the decision to make Europe as a single market. The decision to adopt Euro, in turn, has necessarily also demanded that the European Union's member countries to harmonise their fiscal policy. As such, the demand for a European central bank becomes inevitable”* (Sugiono, 2012).

Adapun, makna harmonisasi kebijakan fiskal menjadi salah satu titik terang bahwa negara-negara Eropa—khususnya Jerman dan Prancis—memiliki keinginan besar untuk mencapai stabilitas tersebut di atas untuk memperkuat situasi Eropa dari sektor ekonomi agar tetap stabil di masa kini dan mendatang. Selain itu, Jerman memiliki kepentingan untuk menjadikan Eropa sebagai benua yang stabil dan makmur. Dengan demikian, Jerman melakukan hal berikut.

Pertama, memposisikan UE sebagai Konsentris Institusional Pertama bagi Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Jerman. UE adalah konsentris institusional pertama bagi proyeksi kebijakan luar negeri Jerman di Eropa. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kanseler Angela Merkel di forum tertinggi UE pada tahun 2011. Dalam pidatonya ia menegaskan bahwa *“Jerman adalah kekuatan Eropa yang tak terelakkan bersama dengan dua negara*

Eropa lainnya yaitu Prancis dan Inggris” (Merkel, 2011). Selain itu dipertegas dengan pendapat dari Speck bahwa Jerman memiliki kepentingan vital di UE dengan tujuan untuk memperkuat sistem kelembagaan UE di Eropa (Speck, 2014).

Kedua, Memperkuat “Segitiga Kelembagaan UE”: Parlemen, Komisi, dan Dewan UE. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Jerman dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan keamanan melalui penguatan Eropa sebagai “*Vibrant Continent*” adalah dengan cara memperkuat “Segitiga Kelembagaan” UE. Dalam hal ini Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan Dewan UE. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “*Germany, as the EU’s current strongest player, should take the initiative and should, with like-minded European partners, work out new concepts for a future EU* (Speck, 2014).”

Ketiga, Jerman memperkuat integrasi UE di bawah pengawasan Parlemen Eropa. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Jerman dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan keamanan melalui penguatan Eropa sebagai “*Vibrant Continent*” adalah dengan cara memperkuat Integrasi UE. Selain itu, sesuai dengan perjanjian yang termuat dalam *The Treaty of Nice*, 2000 yang menandai dasar-dasar kebijakan integrasi dan perluasan anggota UE di Eropa. Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: (a) komposisi dan jumlah Komisioner di Komisi Eropa, (b) bobot suara di Dewan UE, (c) mengganti *unanimity* dengan *qualified majority* dalam proses pengambilan keputusan, (d) pengeratan kerjasama. Pada 1 Februari 2003, traktat berlaku.

Keempat, Memperkuat Kerjasama Institusional UE. Pembentukan UE merupakan sebuah respons atas keinginan untuk membentuk struktur politik yang stabil di kawasan Eropa untuk menghadapi tantangan perekonomian dunia yang semakin berkembang di bawah dominasi AS. UE adalah suatu bentuk penggabungan kekuatan negara-negara Eropa yang direfleksikan melalui sebuah organisasi yang memiliki tatanan khusus dengan beberapa ciri negara berdaulat. Kelemahan UE adalah jumlah keanggotaannya. Jika masing-masing negara memperjuangkan kepentingannya sendirinya tidak akan efektif. Selain itu, Eropa di masa sekarang telah menjadi kawasan tempat berkumpulnya negara-negara yang memiliki kepentingan besar di dunia, namun untuk mencapai kepentingan tersebut, negara-negara Eropa ini mesti mampu menciptakan sebuah pemerintahan bersama sebagai sebuah aktor global yang bersatu, yaitu UE.

D. Pengaruh Jerman terhadap Penguatan UE sebagai “*Constructive of European Security*”

Alasan berikutnya mengapa Jerman memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan arsitektur keamanan regional Eropa pada periode Pasca Perang Dingin adalah karena kemampuannya dalam memperkuat UE sebagai “*Constructive of European Security*”. Adapun yang dimaksud dengan “*Constructive of European Security*” adalah suatu kondisi dimana Jerman secara bersamaan dengan Prancis menciptakan kerjasama keamanan jangka panjang untuk menjaga keamanan. Dengan demikian Jerman melakukan lima hal berikut.

Pertama, mendorong Penguatan terhadap Pelaksanaan Politik Luar Negeri dan Politik Keamanan Bersama (PLNKB) UE. Kepedulian Eropa dalam memperkuat kerjasama multilateral terkait keamanan regional dan internasional di Eropa diwujudkan dalam bentuk penciptaan ‘Strategi Keamanan Eropa’ pada tanggal 12 Desember 2003. Masalah keamanan ini menjadi penting setelah terjadi serangan pada tanggal 11 Maret 2004 di Madrid dan 7 Juli 2005 di London. Berdasarkan *European Security Strategy*, UE memiliki tiga kunci kebijakan luar negeri dalam rangka menghadapi tantangan keamanan yang ada saat ini. Pertama adalah memperpanjang zona keamanan dalam batas luar Eropa. Kedua, mendukung kemunculan tatanan internasional yang adil dan stabil, khususnya sistem multilateral yang efektif. Ketiga, mencari tindakan balasan yang efektif terhadap ancaman lama dan ancaman baru. Pada dasarnya, hubungan eksternal UE terbagi menjadi dua bidang. Pertama adalah integrasi regional di dalam Eropa secara keseluruhan. Contohnya adalah tujuan strategis UE di daerah Balkan untuk mendukung proses stabilisasi dan asosiasi yang didesain untuk mendorong proses reformasi domestik.

Kedua, Mendorong Kemandirian Eropa dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan. Pasca Perang Dingin, Eropa mengintegrasikan kemampuannya untuk menjamin keamanan regional Eropa dengan membentuk *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE). Visi dan misi politik, perekonomian, dan kebijakan UE dapat dipahami dengan mempelajari peran negara-negara dominan penggerak UE seperti Prancis, Jerman, dan Inggris sebagai berikut: Bagi Prancis, terbentuknya UE sebagai regionalisme dimulai dari perjanjian Prancis dan Jerman, Prancis dalam hal ini memegang posisi penting sebagai penggagas utama. Kemudian keterlibatan Prancis meningkat melalui penandatanganan *Schengen Agreement* (14 Juni 1985) di Luxemburg sebagai momentum utama terbentuknya UE yang melibatkan lima negara utama lainnya yakni Belgia, Belanda, Luxemburg, dan Jerman Barat. Perjanjian ini memungkinkan kemudahan untuk bepergian bagi negara-negara yang menyepakatinya sehingga Eropa kemudian beroperasi seperti satu negara tanpa adanya kontrol perbatasan.

Ketiga, Mengurangi Dominasi AS di NATO dan di Eropa. Secara internal pada tahun 1952 Eropa berusaha membangkitkan kekuatan keamanannya dari dalam wilayah regionalnya, diantara negara-negara *European Coal and Steel Community* (ECSC) selanjutnya menjadi UE tahun 1992. Perdana Menteri Prancis, Rena Plaven atas masukan dari Jean Monnet mengusulkan dibentuknya *European Defence Community* (EDC), namun hal tersebut ditolak oleh negara-negara anggota termasuk oleh Prancis sendiri. Namun, tahun 1954 negara-negara ECSC kembali berunding dalam pembentukan sistem keamanan dan pertahanan yang disebut dengan Perjanjian UE Barat *Western European Union* (WEU). Dalam pertemuan yang dihadiri Prancis, Inggris, Jerman, Belgia, Luxemburg, Belanda dan Italia, mereka bersepakat untuk mengintegrasikan diri dalam sebuah angkatan bersenjata. Dalam pertemuan itu dibentuk dewan menteri, sekretariat kecil, majelis konsultatif dan juga badan persenjataan Eropa.

Pada awal mula dibentuknya, forum ini merupakan forum koordinasi kebijakan luar negeri negara anggotanya. Namun, dalam pelaksanaannya, forum ini tidak berjalan secara independen sebagaimana yang diharapkan, masih saja ada campur tangan AS melalui NATO. Konsekuensinya, situasi ini menciptakan ruang saling mendominasi antara negara-negara Eropa dan AS di NATO. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Rio Arianto tentang terciptanya paradigma/Teori Eropa I yaitu “meng-Amerikaserikat-kan NATO (*to make NATO under US*)” dalam situasi ini “jika dominasi AS di setiap kebijakan yang diambil oleh NATO terus meningkat, maka NATO akan menciptakan sebuah keseimbangan kekuatan yang baru bagi AS dan negara-negara Eropa yang akhirnya menciptakan ruang baru bagi AS untuk selalu mendominasi NATO secara keseluruhan (Arianto, 2012:76).” Sebaliknya, menurut Adi Rio Arianto pembalikan dominasi dari negara-negara Eropa terhadap AS untuk melawan dominasi AS merupakan paradigma/Teori Eropa II yaitu “me-NATO-kan Amerika Serikat (*to make US under NATO*)” yang diciptakan untuk mengkaunter atau balik mendominasi sebagai respon atas dominasi AS di NATO (Arianto, 2012:76). Ini dilakukan oleh AS dan negara-negara Eropa untuk mempertahankan pengaruh dan posisi masing-masing dalam NATO. Melihat lebih jauh hubungan Jerman di UE dan NATO bersama-sama dengan Prancis sangat kuat, maka Eropa nampaknya akan semakin kuat. Sesuai dengan pandangan Olof Skog, menyatakan bahwa “*yes of course, since the return of France in NATO Military structure, the NATO become more strong than before and then that fact encourage the position of France in strengthening the EU security syste*” (Skog, 2014).

Keempat, Mendorong UE menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dan Sebagai Aktor Global. Salah satu langkah Jerman dalam memperkuat konstruksi keamanan dan peran UE di level global adalah dengan mendorong UE menjadi anggota tetap DK PBB. Untuk mencapai ini Jerman secara aktif menyoroti kepentingannya di PBB. Berbagai usaha dilakukan, yaitu (1) memastikan *regional security* berada dalam keseimbangan; (2) memperkokoh posisi Jerman sebagai hegemon Ekonomi di Eropa; (3) menjaga dan meningkatkan postur militer dalam keadaan siap siaga. Sejalan dengan ini salah satu usaha yang dilakukan oleh Jerman dalam memperkuat UE sebagai “*Constructive of European Security*” adalah dengan cara mendorong UE menjadi aktor global di Pentas Internasional. Terkait ini, Olof Skog, berpendapat “*I see that the EU security system still need NATO as global partner especially in strengthening the Euro-Atlantics Security and stability. And in this case the EU need power from all the member of the EU especially from Germany, France and UK as “The Big Three of Europe” that’s why the supporting power of these countries is very significant in Europe. So the EU still need NATO as the global partner in Europe to make the EU became a global actor in the world*” (Skog, 2014).

Untuk memperkuat tujuan di atas, Jerman mengejar kepentingan Jerman di level global berupa (1) menjadi negara paling berkontribusi dalam pelaksanaan usaha *peace keeping operation*; (2) mengusahakan agar bisa menjadi anggota tetap DK PBB. Di sini Jerman yang terbangun dalam politik luar negeri Jerman, DK PBB adalah “inti peraturan keamaan dan perdamaian internasional (Genscher, 1991).” Selain itu, Jerman juga mengejar “*international prestige and recognition*” (Weinberg, 2003:56). Pada tahun 2011, Jerman mengumumkan kepentingannya untuk menjadi negara paling kuat di Eropa “*Im Jahr 2011 wissen wir, die deutsche Regierung ein Programm gestartet. Nämlich, wurde zu einem der wichtigsten Städte in Europa*(Merkel, 2011)”, bersamaan dengan terpilihnya Jerman untuk yang keenam kalinya sebagai anggota tetap DK PBB.

E. Pengaruh Jerman terhadap NATO sebagai “*Complement of European Security*”

Alasan terakhir mengapa Jerman memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan arsitektur keamanan regional Eropa pada periode Pasca Perang Dingin adalah karena kemampuan Jerman dalam menjaga NATO sebagai “*Complement of European Security*”. Istilah “*Complement of European Security*” adalah bahwa Jerman menjadikan NATO sebagai kebijakan prioritas kedua setelah UE, oleh karena itu Jerman melakukan

tiga hal berpengaruh. Pertama, menjaga dan memelihara posisi Jerman sebagai *Regional Power* di Eropa dan di NATO: *Germany Power Investation*. NATO menjadi salah satu proyeksi kerjasama multilateral bagi Jerman. Bagi Jerman, hubungan yang erat dan berjiwa saling percaya dengan negara anggota NATO—terkhusus AS, tetap penting artinya. Namun, sifat kemitraan dengan NATO jauh melampaui persekutuan yang menyangkut bidang politik dan militer. Kerjasama institusi internasional sebagai bagian dari pengejawantahan politik luar negeri dan keamanan Jerman merupakan hal yang penting dan utama di NATO dan Eropa. Hal ini ditunjukkan bahwa “*If NATO is Germany’s ultimate life insurance, Berlin must invest in it. Within the alliance, Germany should partner with Eastern neighbors who are committed to keeping the alliance strong, as a credible deterrence against Russian aggression. Making central and eastern Europe safe is Berlin’s interest also makes Germany safe*” (Speck, 2014).

Kedua, menjaga dan memperkuat hubungan Jerman-Prancis dan Inggris sebagai “*The Big Three of Europe*” di NATO dan Eropa. Pada saat ini, selain terlibat dalam institusi internasional dengan prinsip multilateralisme, Jerman juga terlibat di dalam hubungan kerjasama bilateral dengan negara sahabat di Eropa, yaitu *German-Franco Security Cooperation* dan *German-British Security Cooperation*. Diperkuat dalam kutipan berikut, bahwa “*after German reunified, there a lot of talk about “normalization,” or Germany becoming more like Britain and France, including the readiness to use military force as a tool of last resort. The weakness of Germany’s traditional partner in Europe, France, makes Germany look even stronger. The division of eurozone into creditors and debtors as well strengthens Berlin’s hand in intraEuropean*” (Speck, 2014).

Ketiga, menjaga dan Mengimbangi Pola Hubungan dengan AS di NATO. Hubungan Eropa-Atlantik menjadi jauh lebih sulit dan kompleks. Sedangkan, hubungan Jerman dan AS turut mengalami perkembangan di NATO. Pola hubungan ini ditunjukkan melalui keterlibatan Jerman dalam pengembangan *Common Foreign and Security Policy* dan *European Security and Defense Policy* yang bertujuan mengintegrasikan aspek-aspek pertahanan untuk menghadang ancaman instabilitas keamanan. Merkel juga berupaya mempererat hubungan dengan AS dalam sektor perdagangan dan pemberantasan terorisme lewat maksimalisasi peran NATO di Eropa dan Atlantik Utara (Belkin, 2009). Serangan teroris yang dilakukan terhadap AS pada tanggal 11 September 2001 telah menyebabkan banyak perubahan pada tatanan Keamanan Internasional yang turut mempengaruhi tatanan kemanan di Eropa, khususnya AS. Untuk

NATO dan Eropa sepakat untuk melakukan proses evaluasi aliansi secara menyeluruh untuk menghadapi situasi terhadap ancaman keamanan baru di awal abad 21.

Keempat, Menjaga Pola Hubungan dengan Rusia di luar NATO di Eropa. Pola hubungan yang dibangun antara Jerman dan Rusia mengalami kemajuan sejak Pasca Perang Dingin. Hubungan ini dibangun akibat dari kebijakan pembesaran NATO terhadap negara Eropa Timur. Pada periode Perang Dingin, motivasi utama bagi negara-negara menjadi bagian dari Blok Barat adalah untuk menyeimbangkan ancaman Rusia dan kemungkinannya di masa depan. Namun sulit untuk mengklaim bahwa persepsi ancaman negara-negara Eropa Timur berubah menjadi hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan keamanan dengan Rusia. Jerman mendorong sikap kehati-hatian dalam hubungan NATO dengan Rusia. Salah satunya adalah menilai situasi di Ukraina menjadi bahan evaluasi bagi hubungan Rusia-Jerman di Eropa, dikutip bahwa *“But in Europe’s Southern neighborhood (including the Middle East), the EU today is largely absent. In the Ukraine crisis, Germany has taken the lead, but only after years of neglect of the Eastern neighborhood in favor of relations with Russia”* (Speck, 2014).

Hubungan Jerman-Rusia di luar NATO juga dibangun untuk menghindari isolasi terhadap Rusia. Tentara Rusia pernah ditempatkan secara bersamaan dengan NATO dalam upaya mengurangi konflik Kosovo. Selain itu, Jerman bersama anggota-anggota NATO terlihat membangun kekuatan militer untuk menyelesaikan insiden yang terjadi di luar Eropa. Ruang lingkup NATO semakin bertambah dan meluas. Kerjasama Jerman dan Rusia ini membuat AS khawatir jikalau Jerman akan lebih pro Rusia yang dapat mengakibatkan efek domino kepada negara EU lainnya (Belkin, 2009).

VI. PENUTUP

Jerman merupakan negara yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan arsitektur keamanan regional di Eropa pada periode Pasca Perang Dingin. Hal ini didukung oleh efektifitas pelaksanaan ‘kebijakan luar negeri strategis’ Jerman dalam mempengaruhi perilaku aktor-aktor negara dan institusi kawasan baik secara struktural maupun relasional dalam menjaga dan memelihara keamanan regional Eropa pada periode Pasca Perang Dingin. Sebagai analisis deskriptifnya, tulisan ini telah menunjukkan secara mendetail mengenai pengaruh Jerman di Eropa melalui 4 tahap, yaitu: (1) pengaruh Jerman sebagai *“regional power”* di Eropa dengan memainkan posisi sebagai kekuatan ekonomi, militer, sentral geopolitik Eropa, dan sebagai arsitek keamanan di Eropa; (2) pengaruh Jerman terhadap penguatan Eropa sebagai *“Vibrant Continent”* dengan cara memposisikan UE

sebagai konsentris institusional pertama bagi proyeksi kebijakan luar negeri Jerman, memperkuat struktur “Segitiga Kelembagaan UE”, integrasi, dan kerjasama institusional UE; (3) pengaruh Jerman terhadap penguatan UE sebagai “*Constructive of European Security*” dengan cara mendorong penguatan pelaksanaan Politik Luar Negeri dan Politik Keamanan Bersama (PLNKB) UE, mendorong kemandirian Eropa dalam bidang pertahanan dan keamanan, mengurangi dominasi AS di NATO dan di Eropa, serta mendorong UE menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB; dan yang ke (4) pengaruh Jerman terhadap penguatan NATO sebagai “*Complement of European Security*” melalui menjaga dan memelihara posisi Jerman sebagai *regional power* di Eropa dan proyeksinya di NATO, penguatan hubungan Jerman-Prancis dan Inggris sebagai “*The Big Three of Europe*” di NATO dan di Eropa, menjaga dan mengimbangi pola hubungan dengan AS di NATO, dan menjaga pola hubungan dengan Rusia di luar NATO di Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Adi Rio (2015), *Konfigurasi Geopolitik Eropa: Jerman dan Arsitektur Keamanan Eropa Pasca Perang Dingin* (Tesis), Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Arianto, Adi Rio (2012), *Rivalitas Prancis-Amerika Serikat di North Atlantic Treaty Organization (NATO) Pasca Perang Dingin* (Skripsi), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Augustin, Sankt (2007), *Konrad Adenauer and the European Integration*, Berlin: Konrad Adenauer Foundation, Archive for Christian Democratic Policy (ACDP).
- Baldwin, David A. (2002), Power and International Relations. In *Handbook of International Relations*, edited by Walter Carlsnæs, Thomas Risse and Beth A. Simmons, 177-91. London: Sage.
- Beeson, M. (2005), Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in Comparative Historical Perspective. *Journal of European Policy*, 12.
- Beevor, Antony (2003), *Berlin: The Downfall 1945*. Penguin Books., ff. ISBN 0-14-028696-9
- Belkin, Paul (2009), *German Foreign and Security Policy: Trends and Transatlantic Implications*. Congressional Research Service.

- Bendiek, Annegret (2006), *Cross-Pillar Security Regime Building in The European Union: Effects of The European Security Strategy of December 2003*. European Integration online Papers.
- Bogdan, R. dan S.J. Taylor (ed), *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York: Palgrave Macmillan.
- Buzan, Barry and Waever, Ole(2003), *Regions and Powers, The Structure of International Security*, The United Kingdom: Cambridge University Press, The Edinburgh Building.
- Buzan, Barry. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold war era*. London : Pinter.
- Central Intelligence Agency (The World Factbook) (2005), *Rank Order-GDP* (purchasing power parity)
- Central Intelligence Agency (The World Factbook)(2012), “Country Comparison Exports”, ISSN 1553-8133 ISSN 1553-8133.
- Chickering, Roger(2006), *A World at Total War: Global Conflict and the Politics of Destruction 1937–1945*, UK: Cambridge University Press, ISBN 0-275-98710-8.
- Dibb, Paul (2001), “Indonesia: The Key to South-East Asia’s Security”, dalam *International Affairs*, 77 (4), hal. 829-842, diakses pada tanggal 20 Maret 2015, pkl 20. 30 WIB.
- Fischer, Fritz (1967), *Germany's Aims in the First World War*. W.W., New York: Norton & Company, Inc.
- Flemes, Daniel (2007), *Conceptualising Regional Power in International Relations - Lessons from the South African Case*. Working Paper 53. Hamburg: German Institute of Global and Area Studies.
- Fink, Carol (2009), Bernd Schaefer: *Ostpolitik 1969–1974, European and Global Responses*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Fontaine, Pascal (2010), *Europe in 12 Lessons*. EU Publications Office.
- Gaddis, John Lewis (1990), *Russia, the Soviet Union and the United States: An Interpretative History*, McGraw-Hill, ISBN 0-07-557258-3., hlm. 54.
- Gaddis, John Lewis (1997), *We Now Know: Rethinking Cold War History*, Oxford University Press. ISBN 0-19-878070-2.
- Gilpin, Robert(1981), *War and Change in World Politics*, New York: Cambridge University Press.

- Godechot, Jacques et al(1971), *The Napoleonic Era in Europe*. New York: Holt, Reinhart and Winston.
- Hendrajit (2009), Pengamat Politik Luar Negeri Indonesia, Direktur Eksekutif *Global Future Institute*: artikel: “Analisis Geopolitik di Eropa”.
- Hettne, B (1997), *Development, Security and World Order: A Regionalist Approach*, *European Journal of development Research*, 9.
- Hettne,B. and Soderbaun (2002), *Theorizing the Rise of Regionnes*”. London : Routledge..
- Hettne,B. (2000), *The New Regionalism: A Prologue*. In Hettne,B. (ed), *The New Regionalism and the Future of Security Development*, Vol.4. London: Macmillan.
- Hintereder, Peter dan German Federal Foreign Office (in Zusammenarbeit mit dem Auswartigen Amt, Berlin) (2008), *Tatsachen uber Deutschland*, Berlin (Jerman): Sositats-Verlag.
- Hitler, Adolf (2003), ed, Gerhard Weinberg. Trans., Krista Smith, *Hitler's Second Book: The Unpublished Sequel to Mein Kampf*, New York; Enigma Books.
- James, Wil dan Gregory Lowe(2006), *How France has Underminde the European Union*, Civitas Review Agustus 2006, EU Special Edition.
- Jones, Walter S.(1992),*Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional*.Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama.
- Jones, Walter S.(1993), *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2*,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karen, Rasler & William R. Thompson(1994), *The Great Powers and Global Struggle: 1490–1990*. Kentucky: The University Press of Kentucky, Lexington.
- Khong, Yuen Foong(1992), *Analogies at War*.
- Knutsen, Torbjørn L.(1999), *The Rise and Fall of World Order*, New York: Manchester University Press.
- Kohler-Koch, Beate(1997),'*The European Union Facing Enlargement: Still a System of Sui Generis?*,' Working Paper III/20. Manheimer Zentrum für Europäische Soziaalforschung.
- Kriesberg, Louise(1994), *Regional Conflicts in the Post-Cold War Era : Causes, Dynamics, and Modes of Resolution*.
- Lasas, Ainius (2008), Restituting Victims: EU and NATO Enlargements through the Lenses of Collective Guilt.» *Journal of European Public Policy* , 2008: 98-116. «Restituting Korban: UE dan NATO pembesaran melalui Lensa Kolektif Rasa bersalah.» *Jurnal Eropa Kebijakan Publik*.

- Mariani, Renato (2004), «Book Review: Frank Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules and Rhetoric.» *Journal of International Studies Vol.* «Resensi Buku: Schimmelfennig Frank, UE, NATO dan Integrasi Eropa: dan Retorika. Aturan» *Journal of International Studies Vol.33* , 2004: 456. 33.
- Masoed, Mohtar (1996), (Skripsi), Eropa Serikat, Universitas Gadjah Mada
- Mattern, Johannes (1942), *Geopolitik: Doctrine of National Self-Sufficiency and Empire*, Baltimore: The Johns Hopkins Press.
- Morgenthau,HansJ. (1991),*Politik Antar Bangsa: Perjuangan untuk Kekuasaan dan Perdamaian*,Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nolte, Detlef, (2007), How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics, Paper presented at the ECPR Joint Session of Workshops, 7-12 May 2007, Helsinki.
- Pedersen, Thomas (2002), Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration. *Review of International Studies*.
- Rice, Condoleezza with Zelikow, Philip D. Germany Unified and Europe Transformed: A Study in Statecraft. Harvard University Press.hardcover (1995), 520 pages, ISBN 0-674-35324-2; trade paperback, 1997, 520 pages, ISBN 0-674-35325-0.
- Richard J. Evans (2012), "The Other Horror, Review of Orderly and Humane: The Expulsion of the Germans After the Second World War, oleh R.M. Douglas", The New Republic, 25 June 2012.
- Routledge, Paul. et al. (1998), *The Geopolitics Reader*. London: Routledge.
- Rudy, Teuku May (1993),*Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Angkasa.
- Schmitz, Manuel (2013), (University of Trier), “*The Relationship between the EU and Indonesia: A perspective from Brussel*”, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada.
- Schollgen, Gregor (2008), *Facts About Germany*, judul artikel dalam buku “Germany–A Partner Worldwide”, 2008, *Tatsachen uber Deutschland*, Berlin (Jerman): Sositats-Verlag.
- Smith, Gordon dan Stephen Padgett, Thomas Poguntke (2002), “*Continuity and Change in German Politics: Beyond the Politics of Centrality?: a Festschrift for Gordon Smith*”, UK: Psychology Press.
- Snyder, Craig A. (2008), *Contemporary Security and Strategy*, Palgrave: Macmillan.
- Spero, Joshua B, 2005, «Resensi Buku: Schimmelfennig Frank, UE, NATO dan Integrasi Eropa: dan Retorika. Aturan» *Review Slavia 64:2*.

- Stewart-Ingersoll, Robert (2012), *Regional Powers and Security Orders: A Theoretical Framework*, Routledge.
- Strange, Susan (1987), *The Persisting Myth of Lost Hegemony*, *International Organisation*, C.41, No.4.
- Strange, Susan(1989), *Toward a Theory of Transnational Empire*, Ernst-Otto Czempiel and James N. Rosenau (eds.)
- Strange, Susan., “*The Defective State*”, *Daedalus*, Vol. 124, No. 2, What Future for the State? (Spring, 1995), pp. 55-74, The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences.
- Sugiono, Muhadi(2012), *The Crisis in Europe and the End of Regionalism*, (Paper presented at the Indonesia - EU Relations Update, Convention of European Studies 2012), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tammem, Ronald L. (2000), et al. *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*, New York: Chatham House Publishers.
- Warrington, Robert D. (1994), *De Gaulle, NATO, and Gaullist Foreign Policy*. dalam National War College, 300 5th Avenue, Fort Lesley J. McNair, Washington, DC, 20319-6000
- Weinberg, Gerhard L. (1970), *The Foreign Policy of Hitler's Germany: Diplomatic Revolution in Europe 1933–36*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Werner Weidenfeld dan Wolfgang Wessel, 1997, *Europe from A to Z, Guide to European Integration*, Luxembourg: Institut fur Europaische Politik,
- Willmott, H.P. (2003), *World War I*, New York: Dorling Kindersley, ISBN 0-7894-9627-5, OCLC 52541937.
- Wise, Michael Z. (1998), *Capital dilemma: Germany's search for a new architecture of democracy*. Princeton Architectural Press.hlm. 23. ISBN 978-1-56898-134-5

Jurnaldan Dokumen:

- Central Intelligence Agency (The World Factbook), 2005, *Rank Order-GDP* (purchasing power parity).
- Central Intelligence Agency (The World Factbook), 2012, “Country Comparison Exports”, ISSN 1553-8133 ISSN 1553-8133.
- Dibb, Paul, 2001, “Indonesia: The Key to South-East Asia’s Security”, dalam *International Affairs*, 77 (4), hal. 829-842, diakses pada tanggal 20 Maret 2015, pkl 20. 30 WIB.
- Fontaine, Pascal. 2010. *Europe in 12 Lessons*. EU Publications Office.

Geopolitics Journal home page - <http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14650045.asp>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015, pkl 20. 30 WIB.

Germany Trade Statistics, 2009, suite101.com.

Jurnal “Le Monde” di Prancis dan “Frankfurter Allgemeine Zeitung” di Jerman: Tanggal 30 Januari 2013, <http://www.ambafrance-id.org/Jerman-dan-Prancis-mengabdikan-untuk>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015, pkl 20. 30 WIB.

Kohler-Koch, Beate. 1997. *'The European Union Facing Enlargement: Still a System of Sui Generis?'*, Working Paper III/20. Manheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung.

Strange, Susan., “*The Defective State*”, Daedalus, Vol. 124, No. 2, What Future for the State? (Spring, 1995), pp. 55-74, The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences.

Sugiono, Muhadi, 2012, *The Crisis in Europe and the End of Regionalism*, (Paper presented at the Indonesia - EU Relations Update, Convention of European Studies 2012), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Website:

DW, “Tuntutan Jerman untuk Jadi Anggota Tetap DK PBB”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari <http://www.dw.de/tuntutan-jerman-untuk-jadi-anggota-tetap-dk-pbb/a-6102630>

DW, “Neraca Kebijakan Luar Negeri Jerman”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari <http://www.dw.de/neraca-kebijakan-luar-negeri-jerman/a-5866741>

European Commission, “Schengen Information System”, diakses pada Jumat, 10 Juli 2015, pukul 05.00 WIB dari http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm

European Commission, “Questions and Answers: Schengen Information System (SIS II)”, diakses pada Jumat, 10 Juli 2015, pukul 05.00 WIB dari http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-309_en.htm

FAS, “Germany and FAS”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34199.pdf>

German Cultural, “German Cultural: Internal Security”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari http://www.germanculture.com.ua/library/facts/bl_internal_secur.htm

- German Cultural, “German Cultural: National Security”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari http://www.germanculture.com.ua/library/facts/bl_ntl_security.htm
- German Culture, “Pemerintah Republik Jerman “German Culture”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari http://www.germanculture.com.ua/library/facts/bl_internal_secur.htm
- GHDI (*German History in Documents and Images*), “Documents - The New *Ostpolitik* and German-German Relations: Change through Rapprochement (July 15, 1963), , diakses pada Jum’at, 24 Mei 2015, pukul 05.00 WIB dari http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=81
- Hasselbach, Christoph, “Eropa Tidak Akan Jadi Kekuatan Militer”, diakses pada Jum’at, 4 Mei 2015, pukul 04.00 WIB dari <http://www.dw.com/id/eropa-tidak-akan-jadi-kekuatan-militer/a-17313526>
- Müller, Alexander, “Where will Germany go? Revaluating German foreign policy in light of the Ukraine crisis”, diakses pada Jum’at, 24 Mei 2015, pukul 04.00 WIB dari <http://foreignpolicynews.org/2014/04/23/where-will-germany-go-revaluating-german-foreign-policy-in-light-of-the-ukraine-crisis/>
- Pemerintah Republik Federal Jerman, “Neraca Kebijakan Luar Negeri Jerman”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari <http://www.dw.de/neraca-kebijakan-luar-negeri-jerman/a-5866741>
- Speck, Ulrich, 2014, “Power and Purpose: German Foreign Policy at a Crossroads”, diakses pada Jum’at, 24 Mei 2015, pukul 10.00 WIB dari <http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=57167>
- TUD, “Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Jerman”, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04.00 WIB dari <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/politik-luar-negeri/main-content-05/dasar-dasar-politik-luar-negeri-jerman.html>
- Universitat Mannheim, “Ostpolitik and the CSCE”, diakses pada Jum’at, 24 Mei 2015, pukul 05.00 WIB dari <http://www.ostpolitik.net/>